Tinjauan Atas Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung.

Purwosetiono

21310002

tio_ion_mills@yahoo.co.id

Abstrak

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pada Tahun 2006 dan 2007 telah disahkan , Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pemendagri No.59 Tahun 2007 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (APBD) , sehingga penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan diharapkan menjadi lebih efektif. Namun demikian pada awal tahun penerapannya, sistem ini menimbulkan kendala ketidaksiapan aparat di daerah dalam pengaplikasiannya.

Beranjak dari latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas belanja daerah terhadap pelayanan publik dengan mengambil studi kasus di Kota Bandung dan mengambil sampel pada tiga bidang pembangunan (pendidikan, kesehatan, dan prasarana umum). Pengambilan objek kajian pada tiga bidang ini didasarkan pada tingkat keeratan sektor pelayanan tersebut terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Prosedur, Anggaran, Belanja, APBD

Abstract

Local finance is all the rights and obligations in respect of the area local government can be valued in money, including all forms of wealth relating to the rights and obligations of the area, within the framework of the budget revenue and expenditure areas.

In the Year 2006 and 2007 have been ratified, Permendagri No 13 year of 2006 and permendagri No 59 year of 2007 which regulates of Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ,budgeting and implementation of the development program are expected to be more effective. However, in the early years of application, these systems pose a risk to the unpreparedness of the authorities in the region its application

Moving on from the background and problems, this study aims to assess the effectiveness of local spending on public services by taking a case study in Bandung City and took samples on three areas of development (education, health, and infrastructure general). Object retrieval on three areas of study are based on the service sector, the level of closeness The on society.

Keywords: Procedures, estimate, Cost, APBD.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu Daerah (APBD) untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD disusun oleh Badan Eksekutif (pemerintah Kab/Kota), dan Legislatif (DPRD). Salah satu tujuan dibuat anggaran adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin pegawai dan kegiatan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Pengelolaan keuangan daerah ini (APBD) tentu harus dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah, salah satunya adalah dengan adanya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pemendagri No.59 Tahun 2007 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (APBD) ini terdiri atas berbagai aktivitas yaitu mulai dari penyusunan rancangan, penetapan, pelaksanaan, serta Pertanggung jawaban APBD. Proses ini juga dilengkapi dengan formulir-formulir yang digunakan. Selain itu ,di dalam Permendagri ini juga diatur mengenai waktu-waktun penyelesaian setiap aktivitas, misalnya penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran APBD yang bersangkutan . Pada akhir seluruh proses diharapkan Pemda dapat menyajikan pertanggung jawaban .

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun pokok masalah yang ingin penulis ketahui dalam Tinjauan Atas Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Daerah pada (BAPPEDA) Kota Bandung :

1. Masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan Anggaran belanja daerah *(LAPTAH BAPPEDA Tahun 2010).*
2. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan beban kerja yang di laksanakan di badan pemerintahan kota Bandung dan peralatan pendukung kerja yang kurang memadai *(LAPTAH BAPPEDA Tahun 2010).*

1.3 Rumusan Masalah

1 Apakah landasan Hukum Peyusunan Anggaran,sumber penerimaan dan sumber pengeluaran pengeluaran anggaran pada BAPPEDA kota Bandung.

2 Bagaimana Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA kota Bandung.

3 Apakah kendala dan solusi Penyusunan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan terhadap penganggaran pada instansi pemerintah BAPPEDA Kota Bandung yang hasilnya akan digunakan penulis untuk menyusun laporan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui landasan Hukum Peyusunan Anggaran,sumber penerimaan dan sumber pengeluaran pengeluaran anggaran pada BAPPEDA kota Bandung.
2. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja daerah pada BAPPEDA kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi Penyusunan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA kota Bandung.

1. Lokasi dan Tempat Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAPPEDA Kota Bandung tepatnya berada di Jalan Tamansari No.76 Bandung Telp. (022)2500950, Fax. 2501316.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2013 sampai bulan Juni 2013. Adapun kegiatan penyusunan penelitian terdapat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
		2012	2012	2012	2012	2012	2012
1	Tahap Persiapan :	■					
	1.Sosialisasi augas akhir	■					
	2.Menentukan tempat tenelitian	■					
	3.Melakukan pendaftaran tugas akhir	■					
2	Tahap Pelaksanaan :						
	1.Ujian komprehensif	■					
	2.Mengajukan proposal tugas akhir	■					
	3.Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	4.Penelitian di BAPPEDA			■			
	5.Bimbingan tugas akhir						
3	Tahap Pelaporan :						
	1.Menyampaikan draft tugas akhir						■
	2.Sidang Tugas akhir						■
	3.Penyempurnaan laporan tugas akhir						■
	4.Pengumpulan tugas akhir						■

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

Anggaran dalam suatu perusahaan merupakan suatu alat yang penting bagi manajemen. Sebab untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan, manajemen harus dapat mengambil keputusan yang tepat diantara berbagai alternatif yang ada. Untuk itu manajemen memerlukan alat bantu yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Selain itu anggaran merupakan fungsi yang sangat penting kerena merupakan dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi yang lainnya. Salah satu alat bantu yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan fungsi utama manajemen yaitu perencanaan dan pengendalian anggaran.

2.2 Pengertian Prosedur

(M.Nafarin,2009:9)

"Prosedur (*Procedure)* adalah urut-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam."

2.3 Definisi Anggaran

M. Suparmoko (2008) memberikan pengertian anggaran yaitu:

"Anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tetang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasa adalah satu tahun"

2.4 Definisi Belanja

Peraturan Menteri Dalam Negeri *No. 13 Tahun 2006* sebagai berikut :

" Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. "

2.5 Definisi APBD

Menurut (*Abdul Halim 2007:117)* mengemukakan bahwa :

"APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud".

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian.

(Iwan Satibi 2011:74) adalah sebagai berikut :

"Objek penelitian secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komperhensif, yang meliputi karakteristik wilayah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud."

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk mendapatkan data dan informasi ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematika serta suatu cara atau prosedur untuk mendapatkan data terhadap suatu permasalahan dan tujuan serta kegunaan tertentu tanpa harus membuat perbandingan atau menghubungkan dengan objek yang lain.

Dalam melaksanakan penelitian ini, untuk memperoleh data dan fakta yang diperlukan berkaitan dengan tujuan dengan judul yang diambil dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu cara penelitian dengan menggambarkan atau menguraikan secara jelas mengenai objek yang diteliti menegenai Tinjauan atas Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA Kota Bandung.

3.3 Teknik dan Sumber Pengumpulan Data

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Langsung (*Field Research*)
   Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi :
   a. Observasi (*Observation*)
      Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung ke dalam perusahaan untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian.
   b. Wawancara (*Interview*)
      Pengumpulan data berupa sebuah tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.
   c. Dokumentasi (*Documentation*)
      Mengadakan pencatatan dan pengumpulan data yang diidentifikasikan dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Pustaka (*Library Research*)
   Yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (*Referensi*) yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, dalam melakukan studi kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data dari beberapa referensi.

3.3.2 Sumber Data

Pengertian sumber data menurut (Suharsimi Arikunto 2010:172) adalah sebagai berikut :
"Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh."

Sumber data dapat berasal dari Data Primer dan Data Sekunder, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data

primer, dimana data yang diperoleh penulis secara langsung.

Menurut (Sugiyono 2008:193) menjelaskan mengenai data primer bahwa :

“Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.” (

Data primer merupakan data yang langsung dapat dan disajikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek atau perusahaan tempat penulis melakukan penelitian, dimana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang langsung dengan penelitian yang dilakukan.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang dikategorikan sebagai data sekunder misalkan melalui catatan atau arsip perusahaan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.2 Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Landasan Hukum Penyusunan Anggaran, Sumber Penerimaan dan Sumber Pengeluaran APBD pada BAPPEDA Kota Bandung.

Badan Pemerintah Daerah seperti BAPPEDA kota Bandung telah melaksanakan proses penganggaran sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, kemudian menyusun dan melaksanakan kegiatan berkaitan APBD dengan landasan hukum penyusunan Anggaran, Sumber Penerimaan dan Sumber Pengeluaran yang diatur dalam Undang-Undang Negara mengenai pengelolaan dana pemerintahan seperti :

1. *Undang-Undang No 22 Tahun 1999* tentang Pemerintahan Daerah dan
2. *Undang- Undang No 25* tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi
3. *Undang-Undang No 32 Tahun 2004* tentang Pemerintahan Daerah dan,
4. *Undang-Undang No 33 Tahun 2004* tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Selain itu pada pemerintah daerah peraturan mengenai penyusunan anggaran juga tercantum pada :

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pemendagri No.59 Tahun 2007 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (APBD) ini terdiri atas berbagai aktivitas yaitu mulai dari penyusunan rancangan, penetapan, pelaksanaan, serta Pertanggung jawaban APBD (APBD) , dan juga berdasarkan
2. UU 33 Tahun 2003 dan UU 28 Tahun 2009 mengenai Sumber-sumber Pendanaan pada Instansi pemerintah.

4.1.2.2 Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA Kota Bandung.

Penyusunan anggaran belanja daerah seperti pada BAPPEDA kota Bandung juga terdapat pada :

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pemendagri No.59 Tahun 2007 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (APBD) ini terdiri atas berbagai aktivitas yaitu mulai dari penyusunan rancangan, penetapan, pelaksanaan, serta Pertanggung jawaban APBD dan Proses ini juga dilengkapi dengan formulir-formulir yang digunakan.
2. UU 33 Tahun 2003 dan UU 28 Tahun 2009 mengenai Sumber-sumber Pendanaan pada Instansi pemerintah.

Pada BAPPEDA kota Bandung hanya menerapkan metode Otoriter (*top down*) dimana hanya kepala subbagian keuangan saja yang membuat laporan

anggaran belanja pada BAPPEDA kota Bandung sehingga kurang efisien dalam waktu pembuatan laporan anggaran tersebut.

Proses Penyusunan Anggaran Belanja pada BAPPEDA kota Bandung :

1. Tahap penentuan pedoman perencanaan
   Yaitu tahap yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang, anggaran disiapkan beberpa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai.
2. Tahap persiapan anggaran
   Yaitu tahapan dimana manajer perusahaan terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan (*forecast sale*) sebelum menyusun anggaran penjualan pada BAPPEDA.
3. Tahap penentuan anggaran
   Yaitu tahapan diadakannya rapat dari subbagian keuangan, dengan materi rapat berupa perundingan mengenai rencana penyusunan anggaran.
4. Tahap pelaksanaan anggaran
   Yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh subbagian keuangan yang ada di dalam BAPPEDA kota Bandung.

4.1.2.3 Kendala dalam Penyusunan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA Kota Bandung.

Kendala dan pada Penyusunan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA kota Bandung Hilma Kusuman (Kepala Subbagian Keuangan BAPPEDA) yaitu :

1. Metode yang digunakan pada BAPPEDA kota Bandung kurang efektif karena menggunakan metode otoriter (*top down*) dimana hanya kepala subbagian keuangan saja yang menyusun anggaran belanja pada BAPPEDA kota Bandung tanpa adanya kerjasama dengan bawahan subbagian keuangan atau unit terkait sehingga terjadi keterlambatan pembuatan laporan keuangnan dan hasil yang di capaipun kurang maximal.
2. Pada BAPPEDA kota Bandung SDM (*Sumber Daya Manusia*) yang ada kurang memadai dan kurangnya SDM yang kompeten dalam pembuatan Anggaran sehingga terjadi kurang akurat dan efisien dalam penyusunan anggaran belanja daerah.
3. Selain itu Kurangnya peralatan pendukung dalam pembuatan laporan anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat Penyusunan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA kota Bandung mengalami keterlambatan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis terhadap Landasan Hukum PEnyusunan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA Kota Bandung.

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang mengenai pemerintah daerah dan Permendari yang sudah diterapkan pada BAPPEDA kota Bandung sumber-sumber Anggaran Penerimaan dan Sumber Pengeluaran Belanja Daerah berasal dari :

1. PAD
   a) Pajak Daerah
   b) Retribusi Daerah
   c) Hal.Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
   d) Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan
   a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
   b) Dana Alokasi Umum (DAU)
   c) Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Penapatan yang sah
   a) Dana Hibah
   b) Dana Darurat
   c) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya
   d) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
   e) Bantuan dan dari provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya

Sedangkan pengeluaran dana pada Bappeda dapat di urutkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai
   a) Gaji dan tunjangan
   b) Tambahan Penghasilan PNS
2. Program Pelayanan administrasi Kantor

a) Penyediaan jasa komunikasi
b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
c) Penyediaan komponen instalasu listik kantor/bangunan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   a) Pemeliharaan Gedung kantor
   b) Pemeliharaan Kendaraan dinas
4. Program Peningkatan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur
   a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
   b) Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Kerja sama Urusan dan Perencanaan Pembangunan
7. Program Perencanaan Pembangunan ekonomu
8. Program Perencanaan Sosial Budaya
9. Program Perencannaan Prasarana wilayah dan Sumber daya alam salah satunya program Perencannaan Pembangunan fisik dan kewilayahan

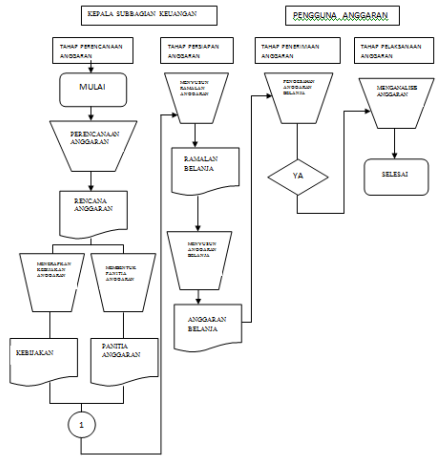
4.2.2 Analisis terhadap Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA kota Bandung.

Di dalam prosedur penyusunan anggaran belanja daerah pada BAPPEDA kota Bandung lebih mengikuti metode Otoriter (*top down*) Dalam metode ini anggaran hanya disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan subbagian keuangan pada BAPPEDA dan anggaran inilah yang harus dilaksanakan tanpa ada keterlibatan bawahan dalam penyusunannya. Sehingga Bawahan tidak diikut sertakan dalam menyusun anggaran. yang mengakibatkan kurangnya kerjasama antara bawahan dan atasan yang terkait juga hasil dan ketepatan waktu dalam penyusunannya pun terhambat dan kurang maximal.

Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Bappeda kota Bandung terdiri dari :

1. Tahap Penentuan Pedoman Perencanaan
   Yaitu tahap yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang, anggaran disiapkan beberpa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai. Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Sebelum menysusun anggaran terlebih dahulu kepala bagian keuangan melakukan dua hal yaitu :
   a. Menetapkan rencana besar BAPPEDA, seperti tujuan, kebijakan dari asumsi-asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran.
   b. Membentuk panitia anggaran yang terdiri dari direktur sebagai ketua, manajer keuangan dan sekretaris serta manajer lainnya sebagai anggota.
   2. Tahap Persiapan Anggaran
   Yaitu tahapan dimana manajer perusahaan terlebih dahulu menyusun ramalan anggaran belanja sebelum menyusun anggaran penjualan BAPPEDA. Setelah tahap tersebut selesai manajer keuangan untuk menyusun anggaran lainnya.
3. Tahap Penentuan Anggaran
   Yaitu tahapan diadakannya rapat dari subbagian keuangan beserta direksi, dengan materi rapat berupa perundingan mengenai rencana penyusunan anggaran, Setiap komponen anggaran serta pengesahan dan pendiskusian anggaran.
4. Tahap Pelaksanaan Anggaran
   Yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh subbagian keuangan yang ada di dalam perusahaan. Untuk kepentingan pengawasan setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah di analisis anggaran disampaikan pada redaksi.

Flowchart Tahapan Penyusunan Anggaran pada Gambar 4.2 hal :



Gambar 4.2

Flowchart Penyusunan Anggaran Belanja Daerah

4.2.3 Kendala dan Solusi Penysunan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA kota Bandung.

Pada BAPPEDA kota Bandung hanya menerapakan metode otoriter (*top down*) dimana hanya kepala subbagian keuangan saja yang mengatur dan menyusun laporan Anggara Belanja Daerah sehingga kurang efektif dan efisien dalam penyusunan anggaran belanja tersebut karena tidak adanya kerjasama antara atasan dan bawahan. Seharusnya metode yang harus dilakukan pada BAPPEDA kota Bandung yaitu metode Campuran (*top down dan Bottom up*) dimana setelah kepala subbagian keuangan mengerjakan sebagian laporan anggaran belanja daerah dan dilanjutkan oleh bawahan untuk diperiksa kembali akan kebenaran dalam hasil laporan tersebut sehingga ada kerjasama yang baik antaran pimpinan subbagian keuangan dan bawahan.

Dalam penyusunan anggaran belanja daerah pada BAPPEDA juga mengalami kendala diakibatkan dari kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dan memadai sehingga mengakibatkan ketidak akuratan dan ketepatan waktu dalam penyusunan anggaran belanja daerah. Sebaiknya SDM yang kurang memadai diberikan pelatihan-pelatihan khusus agar para pegawai dapat bekerja lebih baik dan akurat atau ditambahkan para pegawai yang lebih kompeten dalam bidang penyusunan anggaran belanja daerah sehingga dapat menghasilkan kerjasama antara unit yang terkait di dalam proses prosedur penyusunan anggaran karena Sebagai Instansi Pemerintah daerah BAPPEDA juga harus memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu menyusun laporan Anggaran daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini merupakan pedoman untuk Permendagri agar dapat menyusun anggaran sesuai dengan yang harus dikeluarkan berdasarkan laporan anggaran tersebut dan sesuai dengan pelaksanaannya.

Selain itu pada BAPPEDA kota Bandung pun mengalami permasalahan dari kurangnya peralatan pendukung dalam pembuatan laporan anggaran belanja daerah seperti masih menggunakan sistem operasi lama juga pengerjaan laporan secara manual sehingga terjadi kurang akuratanya dan ketepatan waktu sehingga mengalami keterlambatan dalam penyusunan anggaran belanja tersebut. Permasalahan ini sebaiknya diselesaikan dengan cara penambahan dana untuk membeli peralatan pendukung dan sistem operasi yang sudah modern sesuai dengan perkembangan jaman saat ini

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Analisis dan pembahasan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, maka penulis dapa menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan-kebijakan yang perlu diperhatikan dalam prosedur Laporan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah BAPPEDA Kota Bandung antara lain : Setiap kegiatan belanja pemerintah selalu berdasarkan atas rencana yang

telah di tetapkan pada saat penyusuna APBD, yang dituangkan dalam bentuk program dan kaitan sesuai dengan prioritasnya, setiap elemen pada BAPPEDA harus mampu melaksanakan semua program serta kegiatan yang telah direncanakan, serta melakukan proses pertanggung jawaban atas terselenggaranya kegiatan dan laporan penyusunan anggaran, baik secara internal, pejabat-pejabat BAPPEDA ataupun eksternal terhadap masyarakat. Dan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 dan No. 57 Tahun 2007 serta Peraturan UU 33 Tahun 2003 dan UU 28 Tahun 2009.

2. Metode yang digunakan pada BAPPEDA kota Bandung yaitu metode Otoriter Dimana pimpinan atau subbagian keuangan yang menyusun dan menetapkan sendiri tanpa adanya campur tangan dari bawahan. Dalam metode ini jelas terlihat dari pengertiannya hanya kepala bagian keuangan yang berhak untuk melakukan penyusunan anggaran sehingga di nilai kurang efektif karena tidak ada kerjasama antara bawahan-bawahan yang terkait dalam proses pelaksanaan anggaran terlihat dari tahapan-Tahapan penyusunan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Bandung .
3. Dalam penyusunan anggaran belanja daerah pada BAPPEDA juga mengalami kendala diakibatkan dari kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dan memadai sehingga mengakibatkan ketidak akuratan dan ketepatan waktu dalam penyusunan anggaran belanja daerah.

5.2 Saran

Saran yang disampaikan oleh Penulis dengan harapan akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi BAPPEDA Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan selalu memperhatikan serta meningkatkan kerjasama unit terkait dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
2. Metode dalam pelaksanaannya sebaiknya meggunakan metode campuran dimana tidak hanya kepala subbagian keuangan saja yang melakukan penyusunan anggaran belanja daerah tapi bawahan-bawahan yang terkait ikut serta dalam penyusunan anggaranya agar dapat menyelesaikan laporan anggaran sesuai waktu dan keakuratan dalam penyusunannya dapat dimaksimalkan.
3. Dalam penyusunannya harus dilaksanakan lebih baik lagi dari segi karyawanya harus mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus agar dapat memiliki pengetahuan yang cukup sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum dan peralatan pendukungnya juga harus bisa mengikuti perkembangan jaman sehingga bisa meminimalkan kesalahan dan dapat tepat waktu dalam penyusunan anggarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

Abdul Halim. (2010). *Akuntansi Daerah Sektor Publik* : Jakarta : Salemba 4.

Iwan Satibi. (2011). *Teknik Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi* : Ceplos.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2010) : Bandung.

.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pemendagri No.59 Tahun 2007.

Sugiyono. (2009). *Metlit Skripsi dan Tesis Bisnis* : Jakarta : Rajawalipers.

Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* : Jakarta : Bhineka Cipta

Undang- Undang No 25

Undang-Undanh 28 Tahun 2009

Undang-Undang No.32 Tahun 2004

Undang-Undang No 32 Tahun 2004

Undang-Undang U 33 Tahun 2003 Undang-Undang No 22 Tahun 1999